

# PENGARUH BELANJA DAERAH, PMDN, DAN PMA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA

**Karina Dewi Saputri\*, Candra Fajri Ananda**

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

## DITERIMA

Agustus 2023

## DIREVISI

September 2023

## DISETUJUI

Oktober 2023

**Abstract:** The objective of this research is to analyze the effects of regional expenditures, domestic investments, and foreign investment on the economic growth of all provinces in Java during the 2006–2021 period. Using panel data of six provinces across the sixteen-year period analyzed through panel data regression, this study finds that regional expenditures, domestic investment, and foreign direct investment positively and significantly affect the economic growth of all provinces in Java during the 2006–2021 period, both partially and simultaneously. Regional spending and domestic investment have a direct effect in the year concerned on economic growth, while foreign investment has an effect in a two-year lag. This happens because the level of ease of doing business and investing in Indonesia is still low, so that local governments together with the central government must coordinate more to make regulations for ease of investment, especially in areas on the Java.

**Keywords:** regional expenditure, foreign direct investment, domestic investment, economic growth

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2006–2021. Jenis data yang digunakan adalah data panel dari enam provinsi selama enam belas tahun melalui metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2006–2021, baik secara parsial maupun simultan. Belanja daerah dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh langsung di tahun bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh dalam lag waktu dua tahun. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya tingkat kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, sehingga pemerintah daerah bersama pemerintah pusat harus lebih melakukan koordinasi untuk membuat regulasi dalam kemudahan berinvestasi, khususnya di daerah-daerah di Pulau Jawa.

**Kata Kunci:** belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi



## INDEKSASI

Google Scholar

## PENULIS

### KORESPONDENSI

Karina Dewi Saputri

Email:

karinadewisap@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas  
Brawijaya, Indonesia

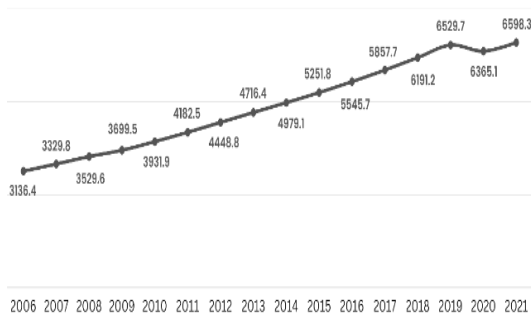
### Cite this as:

Saputri, K. D. & Ananda, C. F. 2023. Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, dan PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 4, Pages 800-813. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.08>

**PENDAHULUAN**

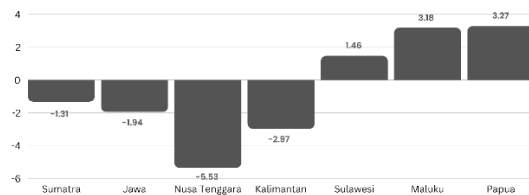
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan multifaset dan melibatkan setiap faktor yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu daerah, serta dapat menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB Indonesia dalam kurun waktu penelitian, yaitu 2006—2021 bergerak positif setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini, total PDRB Indonesia selama enam belas tahun terakhir mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020 melambat sebesar -1,66%, dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 7,49%, pertumbuhan di tahun 2021 ini bahkan lebih besar dibanding tahun 2019 sebelum pandemi yang hanya sebesar 7,07%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 disebabkan oleh masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia yang membuat keadaan perekonomian nasional cukup terganggu, tetapi pada tahun 2021 perekonomian Indonesia bisa kembali tumbuh stabil, bahkan lebih baik dari tahun 2019 sebelum pandemi.



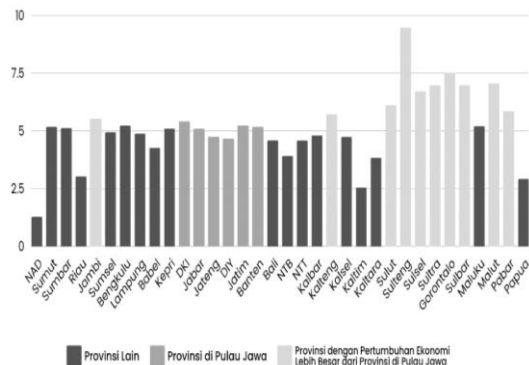
**Gambar 1. Total Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Tahun 2006—2021 (Triliun Rupiah)**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Apabila kita lihat lebih rinci lagi pada setiap pulau besar di Indonesia, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi tiap pulauanya serentak mengalami pergerakan positif di tiap tahunnya, tetapi mengalami kontraksi di tahun 2020 sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19, kecuali Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 (%)**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

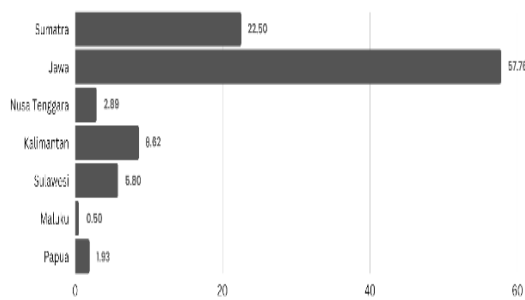
Selain itu, apabila dilihat pada setiap provinsi di Indonesia, berdasarkan data BPS dalam Gambar 3 di bawah ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap provinsi selama tahun 2006—2021 menunjukkan angka yang positif.



**Gambar 3. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2006—2021**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Dapat terlihat bahwa meskipun aktivitas perekonomian didominasi oleh Pulau Jawa dan dikatakan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tidak selalu lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah,

seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat.

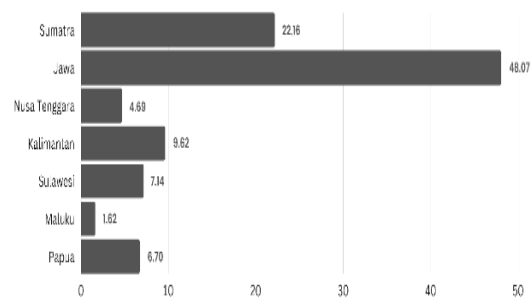


**Gambar 4. Kontribusi PDRB per Pulau terhadap Nasional Tahun 2006—2021 (%)**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Meski demikian, berdasarkan pada Gambar 4 yang bersumber dari BPS, kontribusi PDRB terbesar terhadap PDRB nasional selama tahun 2006—2021 tetap berasal dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 57,76% dan kontribusi terendah berasal dari Kepulauan Maluku sebesar 0,50%. Hal ini terjadi karena 56% penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa, sehingga aktivitas perekonomian Indonesia didominasi oleh Pulau Jawa, serta adanya 52% industri manufaktur di Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa yang juga menjadi salah satu faktor penyebab masih dominannya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan Indonesia. Hal ini tentunya tak terlepas juga dari banyaknya tenaga kerja di Pulau Jawa serta infrastruktur yang sangat baik untuk mendukung Pulau Jawa menjadi pusat industri. Menurut laporan hasil penelitian World Bank, kemajuan infrastruktur dan teknologi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia menjadi relatif lebih cepat sejak abad ke-20.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Keynesian, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh permintaan agregat masyarakat yang meliputi tiga hal, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Hal ini berarti, selain daripada konsumsi rumah tangga, dalam skala makro, investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan dua hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah dalam publikasi Kementerian Keuangan juga diartikan sebagai total keseluruhan belanja negara/-daerah dalam satu periode anggaran. Pemerintah Daerah (Pemda) menganggap pengeluaran daerah atau belanja daerah dalam APBD merupakan suatu hal yang vital dan krusial. APBD seharusnya dikelola secara efektif dan digunakan seefisien mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik secara optimal. Arah pembangunan daerah dan kebijakan Pemda kemudian tercermin dalam belanja daerah, di mana setiap pengeluaran daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Apabila kita lihat pada Gambar 5 yang merupakan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir, yaitu 2006—2021, Pulau Jawa memiliki rasio total realisasi belanja daerah terhadap belanja nasional terbesar jika dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebesar 48,07% dan rasio terendah berasal dari Kepulauan Maluku, yaitu sebesar 1,62%.



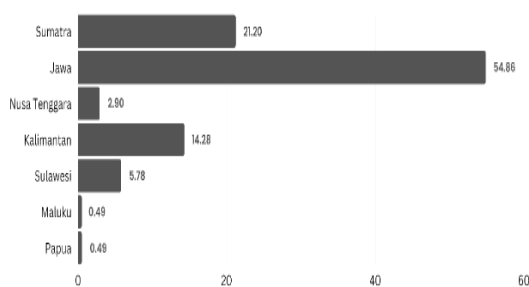
**Gambar 5. Rasio Total Realisasi Belanja Daerah Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2006—2021 (Persen)**

(Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022)

Penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau belanja penanaman modal untuk memperoleh barang modal dan peralatan produksi dalam rangka memperkuat potensi perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga investasi disebut juga sebagai penanaman modal (Sukirno, 2010). Keberhasilan pertumbuhan PDRB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penanaman modal. Penanaman modal dianggap penting dalam

menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi karena selain mendorong kenaikan output yang signifikan, secara otomatis penanaman modal juga akan meningkatkan permintaan input, yang nantinya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal pemerintah dan penanaman modal swasta, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

PMDN adalah aktivitas yang dilakukan oleh investor dalam negeri untuk menginvestasikan uang mereka berupa modal dalam negeri yang bertujuan untuk keperluan bisnis di Indonesia. PMDN dapat berupa penanaman modal untuk memulai usaha baru, meningkatkan kapasitas dan kuantitas barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja, atau memperluas usaha yang sudah ada, sehingga PMDN dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Gambar 6 di bawah, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir, yaitu 2006—2021, realisasi PMDN terbesar berada di Pulau Jawa dengan rasio sebesar 54,86%, sedangkan realisasi terendah berada di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua dengan masing-masing rasio sebesar 0,49% terhadap total realisasi PMDN nasional.



**Gambar 6. Rasio Total Realisasi PMDN Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2006—2021 (Persen)**

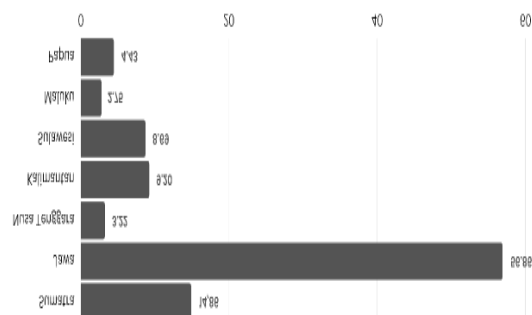
(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik, diolah (2022))

Selanjutnya, PMA dianggap sebagai sumber pemasukan negara Indonesia yang bersifat penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*). Kamaluddin

(2006) menyatakan bahwa untuk mengatasi kekurangan dana dalam proses pembangunan ekonomi perlu dilakukannya pemasukan dana dari luar negeri, dalam hal ini berarti penerimaan penanaman modal asing. PMA memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal baru untuk menutupi kekurangan dana dalam tercapainya sasaran pembangunan ekonomi.

Wen (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa PMA mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui demonstration effect, yaitu difusi ilmu pengetahuan, seperti keahlian manajemen yang kuat dari negara asal PMA ke negara tujuan PMA. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa PMA mampu meningkatkan ketersediaan modal dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut, hal ini menyiratkan bahwa PMA memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bajo-Rubio dkk. (2010) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa PMA berfungsi sebagai sarana transfer teknologi, sehingga terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Gambar 6 di bawah, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir, yaitu 2006—2021, realisasi PMA terbesar berada di Pulau Jawa dengan rasio sebesar 56,86% dan realisasi terendah berada di Kepulauan Maluku dengan rasio sebesar 2,75% terhadap total realisasi PMA nasional.



**Gambar 7. Rasio Total Realisasi PMA Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2006—2021 (Persen)**

(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik, 2022)

Dari semua yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki realisasi belanja daerah, PMA, dan PMDN yang lebih besar dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Namun, apabila kita lihat lebih dalam kepada pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, data yang ditunjukkan oleh BPS menggambarkan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tidak selalu lebih baik dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, laju PDRB saat terjadi resesi ekonomi pada pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu di beberapa pulau, seperti Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua bisa tetap tumbuh positif dibandingkan dengan Pulau Jawa yang melambat negatif. Bahkan, apabila kita lihat lebih dalam lagi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara tidak pernah mengalami kontraksi mencapai negatif dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir, yaitu 2006—2021.

Penelitian seputar pengaruh belanja daerah, PMDN, dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi sudah beberapa kali dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik dilakukan secara parsial maupun secara simultan. Deviani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan rasio belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dalam penelitian Istianto dkk. (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Putri dkk. (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adams (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meilaniwati dan Tannia (2021) juga menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di ASEAN. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Cahyono & Putri (2017) yang menyatakan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lumbila (2005) menyatakan bahwa PMA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 47

negara di Afrika. Salebu (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Cahyono & Putri (2017) yang menyatakan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dilihat bahwa meskipun Pulau Jawa memiliki rasio realisasi belanja daerah, PMDN, dan PMA yang paling besar terhadap nasional, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tidak selalu lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain itu, ditunjukkan pula adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menjadikan perlu adanya penelitian terkait “Analisis Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, dan PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2006—2021” untuk menganalisis apakah memang belanja daerah, PMDN, dan PMA memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2006—2021.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Variabel**

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi suatu negara. Produktivitas masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi yang ikut meningkat, sehingga peningkatan output akan tercipta. Kenaikan output tersebut juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif bagi masyarakat, termasuk meningkatnya pengangguran, menurunnya tingkat kemakmuran, dan adanya ketidakpuasan sosial (Sukirno, 2007).

Dalam teori Keynesian, permintaan agregat masyarakat menentukan kondisi ekonomi makro. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat pada periode tertentu, maka akan terjadi kondisi ‘kekurangan output’. Sedangkan, apabila permintaan agregat lebih rendah dari penawaran agregat, maka kondisi

‘kelebihan output’ yang akan terjadi. Selanjutnya, permintaan agregat diartikan sebagai jumlah dari semua pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Terdapat tiga komponen yang membentuk permintaan agregat, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah (G); di mana pemerintah bisa memengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa selain daripada konsumsi rumah tangga, dalam skala makro, investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan dua hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

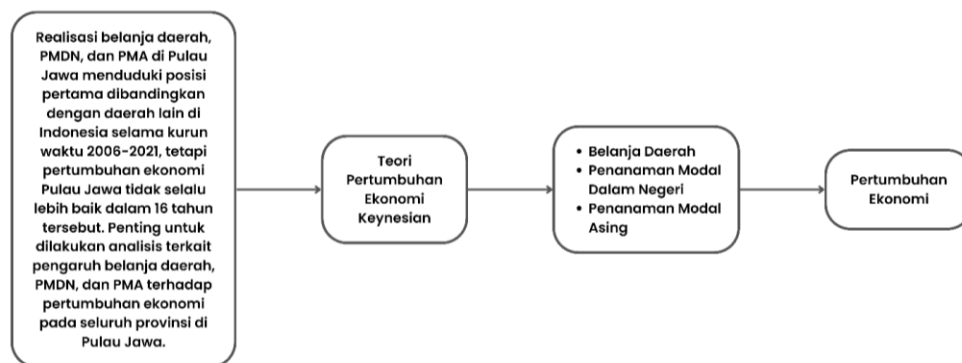
Pertama, pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah sangat berkaitan dengan APBD karena akan berdampak langsung pada kebijakan yang diambil oleh Pemda dan pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Besaran belanja daerah ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi, apabila variabel-variabel tersebut dikelola dengan baik, maka belanja daerah akan meningkat, serta kebutuhan daerah juga akan meningkat, sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengalokasian belanja pemerintah

atau belanja daerah agar program pembangunan ekonomi yang sudah tersusun dapat tercapai, sehingga pembangunan ekonomi di daerah tersebut terlaksana secara optimal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Safitri, Ananda dan Prasetyia, 2021).

Ke dua, investasi dapat menggerakkan kehidupan ekonomi suatu negara, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru (Todaro, 2000). Menurut Adams (2009); Hermes dan Lensink (2003); dan Smarzyńska (2004), PMA dipandang sebagai sarana untuk membiayai pembangunan, membantu transfer teknologi, meningkatkan sumber daya manusia, dan menghasilkan ‘efek kompetitif’, yang semuanya mendorong efisiensi domestik, meningkatnya produktivitas, dan meningkatnya ekspor. Di sisi lain, PMDN yang merupakan aktivitas investor dalam negeri untuk menginvestasikan uang mereka berupa modal dalam negeri yang bertujuan untuk keperluan bisnis di Indonesia juga berperan penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di daerah yang bersangkutan.

**Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut:



**Gambar 8. Kerangka Penelitian**

**Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Istianto dkk. (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

peneliti menduga bahwa belanja daerah seluruh provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2006—2021 memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Meilaniwati dan Tannia (2021) juga menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di ASEAN, peneliti menduga bahwa PMDN seluruh provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2006—2021 memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Salebu (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peneliti menduga bahwa PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2006—2021 memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selama tahun 2006—2021 akan dikaji dengan melakukan analisis melalui variabel belanja daerah, PMDN, dan PMA. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan data cross section dan time series berupa 6 provinsi di Pulau Jawa selama 16 tahun, yaitu rentang tahun 2006—2021.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari pihak di luar sasaran penelitian atau disebut sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh melalui sumber data Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, jurnal, artikel, serta media *online* yang relevan.

Populasi dari penelitian ini adalah belanja daerah, PMDN, PMA, serta pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Sampel penelitian ini merupakan sampel jenuh, yang berarti semua anggota populasi dijadikan sampel, yaitu berupa belanja daerah, PMDN, PMA, serta pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2006—2021.

Analisis data terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan alat analisis EViews 12. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data panel. Kemudian, akan dilakukan

pengujian model untuk menentukan penggunaan model antara CEM, FEM, atau REM melalui uji chow, uji haussman, dan uji *lagrange multiplier*. Setelah menentukan model yang akan digunakan, maka akan dilakukan uji asumsi klasik hanya berupa uji multikolinearitas, sedangkan uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas tidak diperlukan karena penelitian menggunakan data panel, serta dilanjutkan dengan uji statistik hipotesis berupa uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R-squared). Hubungan antara variabelnya ditentukan sebagai berikut:

$$y = f(x_1, x_2, x_3)$$

$y$  = pertumbuhan ekonomi

$x_1$  = belanja daerah

$x_2$  = penanaman modal dalam negeri

$x_3$  = penanaman modal asing

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Berdasarkan dari teori Keynesian yang menyatakan bahwa persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi, yaitu  $Y = C + I + G + (X - M)$ , di mana  $Y$  merupakan pertumbuhan ekonomi,  $C$  merupakan konsumsi rumah tangga,  $I$  merupakan investasi,  $G$  merupakan pengeluaran pemerintah, dan  $(X - M)$  merupakan net ekspor, sehingga perlu untuk mentransformasikannya menjadi persamaan fungsi yang dapat dilakukan dalam analisis regresi. Teknik transformasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah transformasi logaritma ( $\log$ ) yang bertujuan untuk melihat hubungan perubahan persentase variabel independen dengan perubahan persentase variabel dependen.

Dalam regresi data panel, untuk menentukan model persamaan yang tepat perlu dilakukannya uji spesifikasi model atau uji pemilihan model. Berdasarkan pengujian spesifikasi model, hasil uji chow menunjukkan bahwa probabilitas sebesar 0.000 atau  $< 5\%$ , maka *fixed effect model* yang terpilih dalam pengujian. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji haussman menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 atau  $< 5\%$ , maka *fixed effect model* yang terpilih. Hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* dijelaskan dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.71034	0.155139	69.03720	0.0000
LOG(X1)	0.174953	0.017993	9.723136	0.0000
LOG(X2)	0.071864	0.010275	6.994077	0.0000
LOG(X3)	0.012594	0.013539	0.930221	0.3548

Sumber: Eviews 12, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan uji statistik analisis, dari hasil regresi di atas, variabel X3 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,3548 atau > 0,05 bersifat tidak signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terjadi karena nilai PMA (X3) yang terdaftar di BKPM Indonesia tidak terealisasi secara langsung di tahun bersangkutan. Oleh

karena itu, perlu untuk memasukkan lag waktu dalam variabel X3 untuk mencoba memperkirakan pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y pada periode waktu tertentu. Penentuan nilai lag dilakukan dengan melakukan eksperimen dengan nilai lag yang berbeda dan melakukan iterasi atau pengulangan untuk memperbaiki model serta hasil analisis.

Setelah dilakukan eksperimen nilai lag yang berbeda, didapatkan nilai lag 2 sebagai nilai lag yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya, untuk menentukan model persamaan baru yang tepat, maka dilakukan uji spesifikasi model kembali. Hasil uji chow menunjukkan bahwa probabilitas sebesar 0.000 atau < 5%, maka fixed effect model yang terpilih dalam pengujian. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji haussman menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 atau < 5%, maka *fixed effect model* yang terpilih. Hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* dengan nilai lag pada variabel X3 dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*) dengan Menggunakan Nilai Lag**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.78998	0.172308	62.62015	0.0000
LOG(X1)	0.149549	0.019543	7.652263	0.0000
LOG(X2)	0.064547	0.010518	6.136682	0.0000
LOG(X3)	0.040935	0.012266	3.337201	0.0013

Sumber: Eviews 12, data diolah peneliti (2023)

Uji asumsi klasik yang dilakukan hanya berupa uji multikolinearitas, sedangkan uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas tidak diperlukan karena penelitian menggunakan data panel.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode korelasi berpasangan seperti pada tabel 6 di bawah ini, menunjukkan bahwa nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas < 0,85, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas (Widarjono, 2007)

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	LOG(X1)	LOG(X2)	LOG(X3(-2))
LOG(X1)	1.000000	0.663490	0.569783
LOG(X2)	0.663490	1.000000	0.796494
LOG(X3(-2))	0.569783	0.796494	1.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah peneliti (2023)

**Tabel 1. Hasil Regresi dengan Intersep per Wilayah**

<b>Dependent Variable:</b> LOG(Y?)
<b>Method:</b> Pooled Least Squares
<b>Sample (adjusted):</b> 2008 2021
<b>Included observations:</b> 14 after adjustments



Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 84				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.78998	0.172308	62.62015	0.0000
LOG(X1?)	0.149549	0.019543	7.652263	0.0000
LOG(X2?)	0.064547	0.010518	6.136682	0.0000
LOG(X3?(-2))	0.040935	0.012266	3.337201	0.0013
Fixed Effects (Cross)				
BANTEN—C	-0.405366			
DIY—C	-1.446263			
DKI—C	0.550060			
JABAR—C	0.483355			
JATENG—C	0.229452			
JATIM—C	0.588763			
<b>Root MSE</b>	0.085440		<b>R-squared</b>	0.993066
<b>Mean dependent var</b>	13.29821		<b>Adj. R-squared</b>	0.992327
<b>S.D. dependent var</b>	1.032223		<b>F-statistic</b>	1342.693
<b>S.E. of regression</b>	0.090421		<b>Prob(F-statistic)</b>	0.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah peneliti (2023)

Hasil regresi pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah (X1) memiliki pengaruh sebesar 0,149549, PMDN (X2) memiliki pengaruh sebesar 0,064547, dan PMA (X3) memiliki pengaruh sebesar 0,040935 terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model penelitian ini, yaitu variabel belanja daerah, kemudian disusul oleh variabel PMDN dan terakhir PMA. Model persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\log(y) = 10,7900 + 0,14955\log(x_1) + 0,06455\log(x_2) + 0,04093\log(x_{3(t-2)}) + e$$

Selanjutnya akan dilakukan uji statistik hipotesis berdasarkan hasil regresi tersebut. Dapat dilihat dalam tabel 4 di atas, nilai R-squared sebesar 0,993066, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan seluruh variabel independen (X1, X2, dan X3) dalam menjelaskan variabel dependen (Y) memiliki rasio sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian, dapat kita lihat bahwa nilai F-statistic dari hasil regresi tersebut sebesar 1342,693 dengan nilai probabilitas F sebesar 0,00 atau < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Selain itu, perlu dilakukannya uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7 di atas dapat kita lihat bahwa: 1) variabel X1 memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,00 atau < 0,05 dengan nilai koefisien positif, hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y; 2) variabel X2 memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,00 atau < 0,05 dengan nilai koefisien positif, hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y; serta 3) variabel X3 memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,00 atau < 0,05 dengan nilai koefisien positif, hal tersebut mengindikasikan bahwa

variabel X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y.

### Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Hasil output pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai intersep pada model tersebut sebesar 10,79. Intersep merupakan titik potong sumbu y (variabel dependen) ketika x (variabel independen) bernilai sama dengan nol (Gujarati dan Porter, 2009). Artinya, ketika variabel belanja daerah, PMDN, dan PMA sama dengan nol, maka nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 10,79. Selanjutnya, apabila kita melihat kepada intersep masing-masing provinsi di Pulau Jawa, hampir semua provinsi memiliki nilai intersep lebih besar dari nilai rata-rata intersep Pulau Jawa, kecuali Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Banten.

Intersep tertinggi dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 0,59. Artinya, apabila variabel belanja daerah, PMDN, dan PMA sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur senilai 0,59 lebih besar dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut terjadi karena Jawa Timur memproduksi hampir seluruh makanan yang didistribusikan di Indonesia, kecuali kacang kedelai dan bawang putih, bahkan Jawa Timur menyangga 38,91% kebutuhan pangan di Pulau Jawa. Selain itu, kebutuhan barang pokok di Kawasan Indonesia Timur disuplai dari Provinsi Jawa Timur sebesar 40%.

Sedangkan, intersep terendah dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar -1,45. Artinya, apabila variabel belanja daerah, PMDN, dan PMA sama dengan nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta senilai 1,45 lebih rendah dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga di Provinsi DI Yogyakarta tergolong rendah. Rendahnya daya beli masyarakat ini disebabkan oleh relatif rendahnya tingkat upah di Provinsi DI Yogyakarta. Selain itu, penyebab rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga tersebut juga disebabkan oleh masyarakat yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di sekitar rumahnya dengan cara berkebun

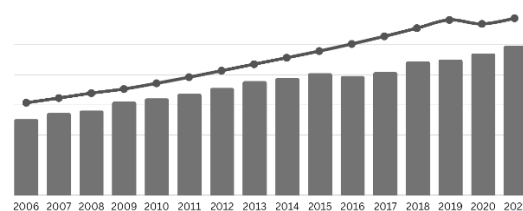
tanaman pangan dan beternak hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

### Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dijelaskan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil output pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui nilai PDRB pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai koefisien pada variabel belanja daerah sebesar 0,149549, hal ini berarti bahwa apabila belanja daerah meningkat sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,15 persen dengan faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jawa Timur, serta Kab/Kota di Provinsi Bolaang Mongondow Raya (Deviani, 2016; Cahyono & Putri, 2017; Istianto et al., 2021). Hasil tersebut juga sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah atau, dalam hal ini, belanja daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Portal Data Kemenkeu yang ditunjukkan oleh gambar 9 di bawah ini, menjelaskan perkembangan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui nilai PDRB.



**Gambar 9. Perkembangan Belanja Daerah dan PDRB Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006—2021 (Miliar Rupiah)**

(Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023)

Dapat terlihat dari gambar tersebut bahwa belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi, yang dijelaskan melalui PDRB, bergerak beriringan hampir selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali di tahun 2016, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 2,46% sedangkan PDRB tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pelebaran risiko perekonomian global sebagai akibat dari adanya ketidakpastian pemulihan ekonomi Tiongkok dan Eropa, konflik geopolitik beberapa kawasan, serta volatilitas harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah melakukan penghematan belanja sampai 12,5% dari anggaran sebelumnya, tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi tetap bergerak positif karena didukung oleh permintaan domestik, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap bertumbuh, serta daya beli masyarakat yang juga tetap terpelihara akibat adanya dukungan stimulus fiskal dari pemerintah dan pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2016).

Selain itu, pada tahun 2020 juga mengalami hal serupa, belanja daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,51%, sedangkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar 2,52%. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya Pandemi Covid-19 yang memicu ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian mengakibatkan penurunan penerimaan modal asing, nilai rupiah yang terdepresiasi, penurunan kegiatan ekspor, serta adanya penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan protokol kesehatan yang mengakibatkan pengurangan mobilitas baik barang, jasa, maupun manusia, sehingga pemerintah melakukan pelebaran defisit mencapai 5,07% dengan fokus belanja pada belanja jaring pengaman sosial dan belanja kesehatan. Namun, usaha tersebut tidak sebanding dengan krisis yang terjadi: daya beli masyarakat yang menurun akibat terjadinya pembatasan mobilisasi dan banyak terjadinya PHK, kegiatan ekspor dan investasi yang menurun, dan sebagainya, sehingga kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tak terelakkan (Bank Indonesia, 2020).

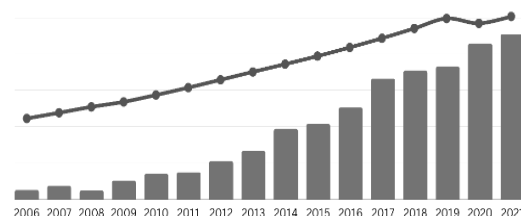
### Pengaruh PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dijelaskan bahwa PMDN memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil output pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel PMDN memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai koefisien pada variabel PMDN sebesar 0,064547, hal ini berarti bahwa apabila PMDN meningkat sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,06 persen dengan faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, Pulau Jawa pada periode 2007-2011, dan Indonesia (Putri, 2014; Meilaniwati dan Tannia, 2021; Ramadhania and Gazali, 2022). Hasil tersebut juga sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa investasi atau, dalam hal ini, PMDN dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditunjukkan oleh gambar 10 di bawah ini, menjelaskan perkembangan PMDN dan pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui nilai PDRB.

Dapat terlihat dari gambar berikut ini yang menunjukkan bahwa PMDN dan pertumbuhan ekonomi, yang dijelaskan melalui PDRB, bergerak beriringan hampir selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali di tahun 2008, PMDN mengalami penurunan sebesar 34,32% sedangkan PDRB tetap mengalami pertumbuhan sebesar 6%.



**Gambar 10. Perkembangan PMDN dan PDRB Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006—2021 (Miliar Rupiah)**

(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik, 2023)

Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya krisis global yang berawal di AS pada 2007 dan semakin melebar hingga ke negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun 2008. Merosotnya pertumbuhan ekonomi global dan tingginya faktor ketidakpastian di pasar finansial mengakibatkan para pengusaha memilih untuk menunda pengeluaran investasi dan meningkatkan efisiensi, sehingga pertumbuhan PMDN ikut melambat. Namun, pertumbuhan ekonomi masih bertumbuh positif karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan daya beli masyarakat yang stabil sebagai akibat dari peningkatan pendapatan karena lonjakan harga komoditas ekspor, kenaikan penghasilan pekerja kelas menengah-atas, serta implementasi penyaluran BLT oleh pemerintah (Bank Indonesia, 2008).

Selain itu, pada tahun 2020 juga mengalami hal serupa, PMDN mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,51%, sedangkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar 2,52%. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya daya tarik aset keuangan domestik di tengah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik, sehingga aliran masuk PMDN tetap bertumbuh positif. Meski demikian, hal tersebut tidak sebanding dengan krisis yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sehingga kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tak terelakkan (Bank Indonesia, 2020).

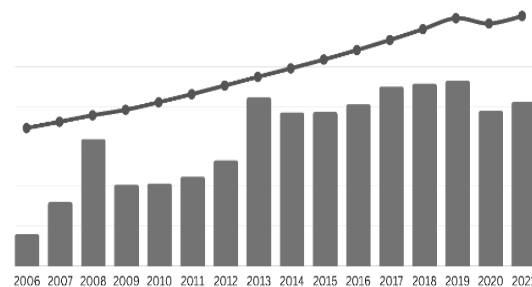
### Pengaruh PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dijelaskan bahwa PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil output pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel PMA memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai koefisien pada variabel PMA dengan lag waktu 2 tahun, yaitu sebesar 0,040935, hal ini berarti bahwa apabila PMA pada tahun ini meningkat sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun ke depan akan meningkat sebesar 0,04 persen dengan faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa

PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika, negara-negara ASEAN, Provinsi Maluku, dan Indonesia (Lumbila, 2005; Salebu, 2016; Meilaniwati dan Tannia, 2021; Ramly, Sangadji dan Wally, 2022). Hasil tersebut juga sejalan dengan teori Keynesian, yang menyatakan bahwa investasi atau, dalam hal ini, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditunjukkan oleh gambar 11 di bawah ini, menjelaskan perkembangan PMA dan pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui nilai PDRB.



**Gambar 11. Perkembangan PMA dan PDRB Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006—2021 (Miliar Rupiah)**

(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik, 2023)

Dapat terlihat dari gambar tersebut bahwa PMA dan pertumbuhan ekonomi, yang dijelaskan melalui PDRB, tidak bergerak beriringan karena pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terjadi bersamaan pada periode yang sama, melainkan dengan lag waktu tertentu (Ramly, Sangadji dan Wally, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMA akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada lag waktu 2 tahun. Artinya, PMA yang tercatat di tahun ini baru akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun ke depan. Hal tersebut terjadi karena dalam pengadaan faktor produksi melalui penyediaan infrastruktur tidak bisa dirasakan secara instan, melainkan butuh proses yang cukup panjang: pengadaan faktor produksi dan infrastruktur tersebut nantinya akan menciptakan lapangan kerja, kemudian akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dan berujung kepada meningkatnya aggregate demand yang akan

mendorong terjadinya produksi pada sektor ekonomi lainnya, dan akhirnya baru akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun kemudian.

Berdasarkan data dari World Bank, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih relatif rendah. Hal ini terjadi karena masih adanya gambaran struktural dari birokrasi pemerintahan, sehingga investasi, dalam hal ini PMA, tidak memberikan dampak yang terlalu besar. Tentu saja fokus masalahnya terletak pada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang belum mampu membuat aturan perizinan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Ananda, 2017). Selain itu, PMA yang terdaftar di BKPM Indonesia tidak terealisasi secara langsung di tahun bersangkutan juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses administratif yang kompleks, perubahan kebijakan atau regulasi, kendala operasional atau infrastruktur, serta faktor eksternal lainnya, seperti kondisi pasar global, situasi politik, dan sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil analisis dan model yang digunakan dalam penelitian ini telah dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh belanja daerah, PMDN, dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2006—2021 dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu penelitian, yaitu 2006—2021 secara parsial. Begitu pula dengan PMDN yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu penelitian, yaitu 2006—2021 secara parsial. Sedangkan pada variabel PMA memberikan hasil bahwa secara parsial PMA di tahun ini baru akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa pada 2 tahun ke depan. Meski demikian, secara simultan atau bersama-sama, belanja daerah,

PMDN, dan PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu penelitian, yaitu 2006—2021.

### Saran

Saran praktis dalam penelitian ini ditujukan bagi pemerintah daerah pada khususnya untuk lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan belanja daerah demi memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, serta diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah pusat terkait regulasi dalam kemudahan berinvestasi di daerah.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini tidak memperhitungkan variabel konsumsi rumah tangga dan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi, di mana dalam realisasinya variabel tersebut merupakan salah satu variabel yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, S. (2009) 'Foreign Direct Investment, Domestic Investment, and Economic growth in Sub-Saharan Africa', *Journal of Policy Modeling*, 31(6), pp. 939–949. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.03.003>.
- Ananda, C.F. (2017) *Doing Business di Indonesia*. Available at: <https://candra-fajriananda.com/doing-business-di-indonesia/> (Accessed: 10 June 2023).
- Bajo-Rubio, O., Díaz-Mora, C. and Díaz-Roldán, C. (2010) 'Foreign Direct Investment and Regional Growth: An Analysis of the Spanish Case', *Regional Studies*, 44(3), pp. 373–382. Available at: <https://doi.org/10.1080/003434008-02508844>.
- Bank Indonesia (2008) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008. Jakarta.
- Bank Indonesia (2016) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016. Jakarta.
- Bank Indonesia (2020) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020. Jakarta.
- Cahyono, H. and Putri, S.A. (2017) 'Pengaruh PMDN, PMA, dan Belanja Daerah Jawa Timur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- di Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi', *Media Trend*, 12(1). Available at: <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2538>.
- Deviani (2016) 'Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan', *Pekbis Jurnal*, 8(1), pp. 1–13.
- Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2009) *Basic Econometrics*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
- Hermes, N. and Lensink, R. (2003) 'Foreign Direct Investment, Financial Development, and Economic Growth', *Journal of Development Studies*, 40(1), pp. 142–163. Available at: <https://doi.org/10.1080/00220380412331293707>.
- Istianto, T., Kumenaung, A.G. and Lopian, A. (2021) 'Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondow Raya', *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), pp. 75–95.
- Kamaluddin, R. (2006) *Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Lumbila, K.N. (2005) *What Makes FDI Work? A Panel Analysis of the Growth Effect of FDI in Africa Acknowledgements*. 33119.
- Meilaniwati, H. and Tannia (2021) 'Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Trade Openness (TO), dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5 Tahun 2009-2018', *Business Management Journal*, 17(1), pp. 89–100. Available at: <https://dx.doi.org/10.30813/bmj> (Accessed: 15 November 2022).
- Putri, P.I. (2014) 'Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa', *Jejak*, 7(2), pp. 100–202. Available at: <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.
- Putri, R.A., Zamzami and Rahmadi, S. (2021) 'Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi', *Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), pp. 107–122.
- Ramadhania, T.S. and Gazali, M. (2022) 'Pengaruh Penerimaan Pajak, PMDN, dan Neraca Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), pp. 1853–1860. Available at: <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14821>.
- Ramly, F., Sangadji, M. and Wally, R. (2022) 'Analisis Kausalitas Antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku', *Journal of Economics Development Issues*, 5(2), pp. 97–108. Available at: <https://doi.org/10.33005/jedi.v5i2.135>.
- Safitri, M.I.D., Ananda, C.F. and Prasetyia, F. (2021) 'Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(2), pp. 85–96.
- Salebu, J.B. (2016) *The Impact of Foreign Direct Investment on Indonesian Economic Growth: Panel Data Analysis For The Period 1994-2013*. 72830. Available at: <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/72830/> (Accessed: 14 November 2022).
- Smarzynska, B.K. (2004) 'Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? in Search of Spillovers Through Backward Linkages', *American Economic Review*, 94(3), pp. 605–627. Available at: <https://doi.org/10.1257/0002828041464605>.
- Sukirno, S. (2007) *Makro Ekonomi Modern*. 4th edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2010) *Makroekonomi: Teori Pengantar*. 3rd edn. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M.P. (2000) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. 3rd edn. Jakarta: Erlangga.
- Wen, M. (2005) *Foreign Direct Investment, Regional Geographical and Market Conditions, and Regional Development: A Panel Study on China*.
- Widarjono, A. (2007) *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta Ekonisia.